









## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2016 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



https://ps.go.id



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2016

ISBN: 978-602-5402-07-4

Nomor Publikasi: 19520.1708

Katalog: 4601006.19

Ukuran Buku: 14 cm x 17 cm

Jumlah Halaman: vi + 28 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"









#### **KATA PENGANTAR**

Bangka Belitung 2016 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Booklet* ini berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar aspek, variabel dan indikator IDI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Kepulauan Bangka Belitung. Besar harapan kami *booklet* ini dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Kepulauan Bangka Belitung.

Booklet Indeks Demokrasi Indonesia Kepulauan

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga booklet ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepala

Darwis Sitorus

https://ps.go.id

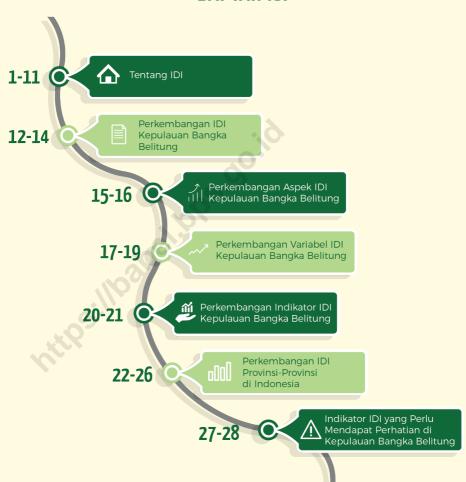








#### **DAFTAR ISI**



#### Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





#### Pencapaian IDI di 2016

Pertama kalinya sejak 2009, IDI Babel berkategori "BAIK"

IDI Babel 2016 meningkat 10,69 poin dibandingkan 2015









## **TENTANG IDI**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia.

IDI merupakan pengukuran yang country specific, yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

IDI lahir sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam berkomitmen untuk meningkatkan serta untuk memajukan pembangunan bidang politik di Indonesia.









IDI merupakan usaha bersama beberapa lembaga dan instansi, yaitu:

- Kemenkopolhukam, Bappenas, Bappeda Provinsi sebagai koordinator untuk pemanfaatan IDI
- Kemendagri/Kesbang sebagai koordinator untuk pokja provinsi
- BPS sebagai koordinator pengumpulan data dan pengolahan IDI

**KERJASAMA** 

#### PRINSIP Dasar IDI

- IDI hanya mengukur demokrasi politik pada tingkat provinsi.
- IDI hanya mengindikasikan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi, bukan suatu studi etnografis yang rinci yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi.
- IDI mengukur perkembangan demokrasi dari dua sisi: peran negara (pemerintah) dan masyarakat.
- IDI bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan akhir melalui pemanfaatan indeks yang telah dihasilkan.









#### 3 ASPEK IDI

Dalam penyusunan IDI, tingkat perkembangan demokrasi diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, yaitu:

- 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty)
- 2. Hak-Hak Politik (*Political Right*), dan
- 3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

- Menganalisis kelemahan dan kekuatan praktikpraktik demokrasi di Indonesia sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan dan kemajuan nilai-nilai demokrasi.
- Memformulasikan indeks demokrasi yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia.
- Mendorong pemikiran lebih dalam mengenai bagaimana mendefinisikan dan mendeskripsikan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan praktikpraktik demokrasi di Indonesia.
- Memformulasikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka akselerasi demokratisasi di Indonesia

#### TUJUAN IDI









#### **MANFAAT IDI**

- Secara akademis, IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia sehingga dapat membantu para akademisi dalam mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.
- Dengan adanya IDI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melihat tingkat perkembangan pembangunan demokrasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di Indonesia.
- Bagi pemerintah dan masyarakat, data IDI dapat digunakan untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.
- Dengan adanya IDI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pokja IDI dapat melihat kekuatan dan kelemahan pembangunan demokrasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan secara bersama-sama mencari solusinya.









## **LATAR BELAKANG LAHIRNYA IDI**

Setelah berakhirnya era pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto pada Mei 1998, terbuka kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi menjadi pilihan satu-satunya karena dianggap tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Gerakan demokratisasi yang terjadi di Indonesia pasca pemerintahan Soeharto dimulai dengan timbulnya gerakangerakan yang dilakukan oleh massa secara spontan. Para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara dan berserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Suasana kebebasan ini tercipta hingga ke level daerah. Masyarakat kian menyadari hakhaknya dan semakin peka terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan dianggap merugikan rakyat. Bahkan lebih jauh perkembangan demokrasi juga menyentuh lembaga legislatif di tingkat daerah yang dicerminkan oleh penguatan kedudukan dan fungsi DPRD. Lembaga wakil rakyat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan Gubernur/ Bupati/Walikota. Gubernur tidak lagi sebagai penguasa tunggal seperti yang disebutkan dalam UU pada masa Orde Baru (UU No 5 tahun 1974).









Dalam upaya menyikapi perkembangan politik ini pemerintah harus dapat bersikap lebih tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat dan harus dapat merespon berbagai tuntutan-tuntutan masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya. Pada masa transisi demokrasi yang besar ini tentunya pemerintah baik di level nasional maupun daerah sangat perlu untuk mengetahui sejauh mana demokrasi berkembang dan telah diterapkan di seluruh wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia berusaha menegakkan demokrasi, sangat menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Selama ini perkembangan demokrasi di Indonesia hanya diukur secara kualitatif yaitu berdasarkan perkiraan yang bersifat subyektif tanpa tolok ukur yang jelas. Sudah saatnya perkembangan demokrasi diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata. Pada tahun 2009 IDI lahir sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan data yang dapat memberikan gambaran terhadap kondisi demokrasi di tanah air.

Data yang diperoleh dari IDI merupakan cerminan kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat, yang diambil, dikumpulkan, dan kemudian melalui suatu proses pembobotan diperoleh nilai yang dapat dijadikan tolok ukur terkait bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia.









#### **METODOLOGI IDI**

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan pengumpulan data IDI terdiri dari 3 tahapan utama yaitu:

#### 1. KODING KORAN DAN DOKUMEN

Pada tahap ini data-data IDI dikumpulkan melalui koding berita yang ada di surat kabar dan juga melalui koding dokumen ke instansi dan lembaga terkait IDI seperti Badan Kesbangpol, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Biro Hukum, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, serta Partai Politik.

Sesuai dengan arahan dari kesepakatan tim ahli, pengumpulan data melalui koding koran dilakukan menggunakan satu sumber koran yang dianggap memenuhi syarat yaitu:

- 1. Oplah terbesar di level provinsi
- 2. Cakupan berita meliputi seluruh wilayah provinsi

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih BABEL POS sebagai sumber utama koding koran,karena dianggap memenuhi kedua syarat tersebut.









#### 2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Pada tahap kedua, data IDI dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) IDI. Pada tahap ini FGD berfungsi untuk melengkapi kekurangan informasi yang berasal dari koding koran dan dokumen serta untuk mengklarifikasi pemberitaan yang kurang jelas. Selain itu, FGD dilakukan untuk mengakomodir berita-berita yang mungkin belum tercakup di media utama yang digunakan (Babel Pos).

Di dalam FGD, hasil koding koran dan koding dokumen dijadikan sebagai acuan untuk mengklarifikasi berita/data-data yang ada kepada peserta FGD IDI yang hadir.

#### 3. WAWANCARA MENDALAM (WM)

Setelah FGD IDI selesai dilaksanakan, tahapan pengumpulan data IDI selanjutnya yaitu melakukan Wawancara Mendalam (WM). WM IDI dilakukan untuk menggali dan memperjelas berita-berita yang dibahas di dalam FGD tetapi informasinya masih belum lengkap. WM IDI dilakukan kepada narasumber yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Narasumber WM biasanya adalah peserta FGD yang aktif dalam memberikan masukan dan klarifikasi terhadap berita/kasus-kasus yang ditemukan baik dalam review koran maupun dokumen.









### 3 KATEGORI IDI

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di setiap provinsi digunakan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi, skala 1-100 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- Baik, jika indeks bernilai > 80,
- 2. Sedang, jika indeks bernilai 60-80 dan
- 3. Buruk, jika indeks bernilai <60.

#### Kinerja Demokrasi berkategori "BAIK" jika nilai IDI > 80









## KOMPONEN PERHITUNGAN IDI

Aspek	Variabel	Indikator
(1)	(2)	(3)
A. Kebebasan Sipil	I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat     Ancaman/penggunaan kekerasan oleh
		masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
	II. Kebebasan Berpendapat	Ancaman / penggunaan kekerasan oleh     aparat pemerintah yang menghambat     kebebasan berpendapat
	iselion	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
	III. Kebebasan Berkeyakinan	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
S		Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya
Wife.		<ol> <li>Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama</li> </ol>
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
		<ol> <li>Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya</li> </ol>
		<ol> <li>Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya</li> </ol>

Bersambung...









#### ...Sambungan

Aspek	Variabel	Indikator
(1)	(2)	(3)
B. Hak-Hak Politik	V. Hak Memilih dan Dipilih	<ol> <li>Hak memilih atau dipilih terhambat</li> <li>Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih</li> <li>Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)</li> <li>Voters turnout</li> <li>Persentase anggota perempuan DPRD provinsi</li> </ol>
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan     Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
C. Lembaga Demokrasi	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 19. Kecurangan dalam penghitungan suara
S	VIII. Peran DPRD	<ul><li>20. Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan</li><li>21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD</li><li>22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif</li></ul>
Will.	IX. Peran Partai Politik	<ul><li>23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu</li><li>24. Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi</li></ul>
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	<ul><li>25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN</li><li>26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah</li></ul>
	XI. Peran Peradilan yang Independen	Reputusan hakim yang kontroversial     Renghentian penyidikan yang     kontroversial oleh jaksa atau polisi









## PERKEMBANGAN IDI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penyusunan IDI telah dilaksanakan selama 8 (tujuh) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2009 hingga tahun 2016. Dalam kurun waktu 8 tahun tersebut perkembangan IDI Bangka Belitung berkembang cukup fluktuatif, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara lebih jelas perkembangan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 8 tahun dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1. Perkembangan IDI Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia, 2009-2016











Grafik 1 memperlihatkan bahwa sejak tahun 2009 nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup berfluktuasi tetapi memiliki kecenderungan meningkat. IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2009 sebesar 67,01 kemudian turun menjadi 65,94 pada 2010. Selanjutnya nilai IDI terus mengalami peningkatan sampai tahun 2012 menjadi 69,37, dan kembali turun menjadi 68,79 pada 2013.

Pada tahun 2014, nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik cukup tinggi sebesar 6,53 poin menjadi 75,32. Walaupun mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada 2014, capaian kinerja demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dikategorikan "baik" (>80,00). Pada tahun 2015, IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mengalami penurunan sebesar 3,01 poin, yaitu dari 75,32 pada 2014 menjadi 72,31 pada 2015 dan masih berkategori "sedang".

IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik cukup tajam pada 2016. IDI naik 10,69 poin menjadi 83,00 pada 2016 dari 72,31 pada 2015. Status kinerja demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pertama kalinya meningkat dari kategori "sedang" menjadi kategori "baik".

Pada tahun 2009 IDI Kepulauan Bangka Belitung hanya selisih 0,29 poin di bawah IDI Indonesia. Selanjutnya pada 2010 hingga 2014 nilai IDI Kepulauan Bangka Belitung selalu lebih tinggi dari IDI Indonesia, dengan selisih terbesar terjadi pada 2012 yaitu sebesar 6,74 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan demokrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi









nasional. Namun demikian, pada tahun 2015 IDI Kepulauan Bangka Belitung kembali berada di bawah IDI Indonesia dengan selisih 0,51 poin. Selanjutnya pada 2016, IDI Kepulauan Bangka Belitung jauh lebih tinggi dibandingkan IDI Indonesia dengan selisih tertinggi selama 8 tahun terakhir, yaitu 12,91 poin.

Secara umum, dari perkembangan data IDI sejak tahun 2009-2016, fluktuasi data IDI sangat dipengaruhi oleh temuan dari koran maupun dokumen. Untuk itu, dalam rangka mempertahankan capaian nilai IDI di 2016, tentunya diperlukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana demokrasi yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berjalan. Selain itu, melalui evaluasi dapat diketahui indikator apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas pemerintah. Hal ini penting agar kehidupan demokrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berkategori "baik" ini dapat dipertahankan.

Pencapaian IDI di 2016

#### Pertama kalinya sejak 2009, IDI Babel berkategori "BAIK"

IDI Babel 2016 naik 10,69 poin dibandingkan 2015



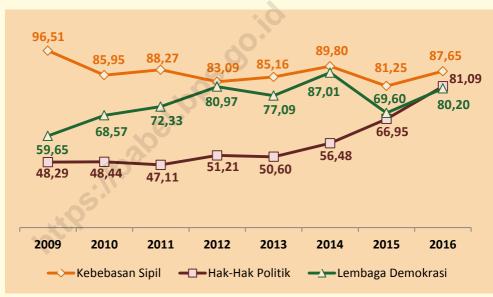






## PERKEMBANGAN ASPEK IDI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Grafik 2. Perkembangan Nilai Aspek IDI Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia, 2009-2016



#### Pada 2016, seluruh aspek IDI berada pada kategori "BAIK"









Kenaikan nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2016 didukung oleh kenaikan dari ketiga aspek IDI. Aspek Kebebasan Sipil naik sebesar 6,40 poin, dari 81,25 pada 2015 menjadi 87,65 pada 2016. Aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan tertinggi sebesar 14,14 poin, dari 66,95 pada 2015 menjadi 80,20 pada 2016, dan mengalami peningkatan status dari kategori "sedang" menjadi kategori "baik". Aspek Lembaga Demokrasi juga mengalami kenaikan sebesar 10,60 poin, dari 69,95 pada 2015 menjadi 81,09 pada 2016, dan juga mengalami peningkatan status menjadi kategori "baik". Pada 2016 seluruh aspek IDI berada pada ketegori baik.

Jika dilihat dari tahun 2009 hingga 2016, aspek Kebebasan Sipil selalu berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan kedua aspek lainnya. Walaupun berfluktuasi, namun nilainya stabil pada kategori "baik". Sementara itu, aspek Hak-Hak Politik memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dari 48,29 (kategori "buruk") pada 2009 menjadi 81,09 (kategori "baik") pada 2016. Aspek Hak-Hak Politik yang sebelumnya selalu berada di posisi terendah, pada 2016 nilainya berada di atas aspek Lembaga Demokrasi.

Di sisi lain, nilai dari aspek Lembaga Demokrasi paling berfluktuatif dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan dari 2012 (80,97) ke 2013 (77,09), kemudian naik pada 2014 (87,01), dan kembali turun pada 2015 (69,60). Pada 2016, aspek Lembaga Demokrasi kembali mengalami peningkatan menjadi 81,09.









## PERKEMBANGAN VARIABEL IDI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 1. Perkembangan Nilai Variabel IDI Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2016

No	Variabel	2015	2016	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	100,00	0,00
2	Kebebasan Berpendapat	77,77	100,00	22,23
3	Kebebasan Berkeyakinan	74,14	81,53	7,39
4	Kebebasan dari Diskriminasi	93,38	93,47	0,08
5	Hak Memilih dan Dipilih	73,37	73,30	-0,08
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan	60,52	88,88	28,36
	Pengawasan Pemerintahan			
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	0,00
8	Peran DPRD	46,02	44,33	-1,69
9	Peran Partai Politik	96,63	96,95	0,32
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	69,24	67,12	-2,12
11	Peran Peradilan yang Independen	50,00	100,00	50,00

## Pada 2016, variabel Peran DPRD masih berkategori "BURUK"









Secara keseluruhan variabel dalam IDI berjumlah 11 (sebelas) variabel. Kesebelas variabel ini antara lain sebanyak 4 (empat) variabel dari aspek Kebebasan Sipil, 2 (dua) variabel dari aspek Hak-Hak Politik dan 5 (lima) variabel dari aspek Lembaga Demokrasi.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa sebagian besar variabel IDI pada 2016 sudah berkategori "baik" (>80). Hanya terdapat 3 kategori yang belum berkategori "baik", yaitu variabel Hak Memilih dan Dipilih dan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang berkategori "sedang" (60-80), serta variabel Peran DPRD yang berkategori "buruk" (<60).

Variabel Peran Peradilan yang Independen mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 50,00 poin, dari 50,00 pada 2015 menjadi 100,00 pada 2016. Variabel lain yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi adalah variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (naik 28,26 poin) dan variabel Kebebasan Berpendapat (naik 22,23 poin).

Walaupun nilai IDI 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat tajam secara keseluruhan, namun masih terdapat variabel yang mengalami penurunan, antara lain variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (turun 2,12 poin), variabel Peran DPRD (turun 1,69 poin), dan variabel Hak Memilih dan Dipilih (turun 0,08 poin).









Grafik 3. Perkembangan Nilai Variabel Peran DPRD Kepulauan Bangka Belitung, 2009-2016



Variabel Peran DPRD nampaknya perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Grafik 3, nilai variabel Peran DPRD pada 2009 berada pada kategori "sedang" dengan nilai 67,18, selanjutnya pada 2010 turun menjadi 45,08 dan berubah menjadi kategori "buruk". Angka ini terus menurun hingga 2013 mencapai 19,54. Nilai variabel Peran DPRD mulai meningkat di 2014 dan 2015, namun tetap berada pada kategori "buruk", selanjutnya kembali turun di 2016 dengan angka 44,33.









## PERKEMBANGAN INDIKATOR IDI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator IDI sudah berada pada kategori "baik" (>80). Dari 28 indikator, 18 indikator sudah berkategori "baik". Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan oleh 4 (empat) indikator yang berkategori "buruk" (<50), yaitu Persentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi (29,63), Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan (49,33), Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif (10,71), Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya meningkat.

Indikator Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 89,29 poin, dari 100,00 pada 2015 menjadi 10,71 pada 2016. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah (turun 8,34 poin) dan Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok (turun 0,05 poin). Sementara itu, indikator yang naik cukup tajam yaitu Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi (naik 100,00 poin), dan Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat (naik 50,00 poin).









Tabel 2. Perkembangan Nilai Indikator IDI Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2016

	2015-2016			
No	Indikator	2015	2016	Perubahan
	Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	0,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	0,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	83,33	100,00	16,67
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	100,00	50,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya	73,91	73,91	0,00
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	65,63	100,00	34,37
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	80,00	100,00	20,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83,83	83,33	-0,50
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	100,00	100,00	0,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender dst	100,00	100,00	0,00
	Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	94,23	94,23	0,00
12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00	0,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	76,63	76,63	0,00
14	Voters turnout	72,50	72,50	0,00
15	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi	29,63	29,63	0,00
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	61,96	88,04	26,08
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	59,08	89,72	30,64
	Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00	0,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	89,87	0,00
20	Persentase Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	37,58	49,33	11,75
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	17,65	63,16	45,51
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	100,00	10,71	-89,29
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00	0,00
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	66,30	69,12	2,82
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	92,11	97,37	5,26
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	50,00	41,66	-8,34
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00	0,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	100,00	100,00









## PERKEMBANGAN IDI PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA

Grafik 4 menunjukkan terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi dengan kategori "baik" pada tahun 2016, yaitu DI Yogyakarta (85,58), Kepulauan Bangka Belitung (83,00), Nusa Tenggara Timur (82,49), dan Sumatera Selatan (80,95). Sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori "sedang", dan satu provinsi yaitu Sumatera Barat masuk dalam kategori "buruk".

Pada tahun 2016, terdapat 5 (lima) provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan status kinerja demokrasi yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur, yang naik dari kategori "sedang" ke kategori "baik", serta Papua dan Papua Barat, yang naik dari kategori "buruk" ke kategori "sedang" . Sementara itu, ada 4 (empat) provinsi yang mengalami penurunan status kinerja demokrasi, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, yang turun dari katerori "baik" ke kategori "sedang", serta Sumatera Barat yang turun dari kategori "sedang" ke kategori "buruk". Sementara itu, nilai IDI secara nasional turun dari 72,82 pada 2015 menjadi 70,09 pada 2016.

Dari 34 provinsi di Indonesia, nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat ke -2. Peringkat ini naik dari tahun sebelumnya di mana Kepulauan Bangka Belitung









berada pada urutan ke-17. Kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari kategori "sedang" ke kategori "baik". Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan kenaikan nilai IDI tertinggi ketiga di 2016, yaitu sebesar 10,69 poin. Kenaikan nilai IDI tertinggi di 2016 dicapai oleh Provinsi Maluku dengan kenaikan sebesar 12,30 poin. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan penurunan IDI tertinggi di 2016, yaitu turun sebesar 14,44 poin, dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016.

IDI Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang tertinggi di Wilayah Sumatera pada 2016, mengalami kenaikan peringkat dari peringkat ketiga pada 2015 menjadi peringkat pertama pada 2016.

Nilai aspek Kebebasan Sipil tertinggi pada 2016 berada di Provinsi Kalimantan Utara (100,00) dan terendah di Provinsi Sumatera Barat (51,01). Nilai aspek Hak-Hak Politik tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Selatan (83,58) dan terendah di Provinsi Papua Barat (38,05). Sementara itu, nilai aspek Lembaga Demokrasi tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta (86,37) dan terendah di Provinsi Jawa Barat (49,79).

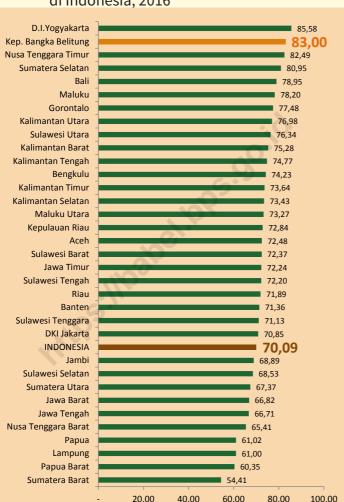








Grafik 4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2016



Babel
peringkat 2
secara
nasional







Tabel 3. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Aspek, 2015-2016

ar maonesia menaraerispen, 2010 2010								
_	IDI 2015			IDI 2016				
Provinsi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil		Aspek Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	67,78	74,81	63,98	64,97	72,48	92,92	63,94	60,33
Sumatera Utara	69,01	82,02	62,17	63,52	67,37	82,71	62,29	56,13
Sumatera Barat	67,46	52,99	69,77	82,01	54,41	51,01	54,33	58,82
Riau	65,83	66,46	66,61	63,80	71,89	71,78	77,98	62,34
Jambi	70,68	75,89	62,12	77,72	68,89	84,39	65,63	54,58
Sumatera Selatan	79,81	96,06	78,79	61,00	80,95	91,17	81,94	66,53
Bengkulu	73,60	78,50	68,45	75,61	74,23	85,14	63,84	77,01
Lampung	65,95	71,99	63,19	62,74	61,00	60,49	59,32	64,31
Kep. Bangka Belitung	72,31	81,25	66,95	69,60	83,00	87,65	81,09	80,20
Kepulauan Riau	70,26	80,16	65,01	66,13	72,84	85,43	71,28	59,48
DKI Jakarta	85,32	89,64	83,19	83,26	70,85	81,11	67,54	63,19
Jawa Barat	73,04	79,10	81,89	51,37	66,82	73,37	72,34	49,79
Jawa Tengah	69,75	79,44	67,28	61,48	66,71	66,06	67,24	66,69
D.I.Yogyakarta	83,19	90,41	77,98	82,38	85,58	90,00	81,59	86,37
Jawa Timur	76,90	85,26	67,44	81,39	72,24	73,73	76,49	63,63
Banten	68,46	74,28	63,72	68,66	71,36	83,47	68,30	60,99
Bali	79,83	94,42	77,42	65,31	78,95	96,94	69,60	71,18
Nusa Tenggara Barat	65,08	51,59	61,11	88,36	65,41	65,06	62,08	71,13
Nusa Tenggara Timur	78,47	93,19	71,69	70,73	82,49	96,25	81,68	66,46
Kalimantan Barat	76,40	96,81	65,57	67,95	75,28	83,29	75,70	64,54
Kalimantan Tengah	73,46	85,07	68,31	67,05	74,77	84,98	70,66	68,43
Kalimantan Selatan	74,76	54,15	85,77	83,17	73,43	61,04	83,58	72,89
Kalimantan Timur	81,24	93,07	82,74	63,99	73,64	78,25	78,35	60,36
Kalimantan Utara	80,16	98,10	83,65	52,05	76,98	100,00	66,64	64,48
Sulawesi Utara	79,40	86,71	77,92	72,53	76,34	96,31	70,42	60,62
Sulawesi Tengah	76,67	94,60	68,85	66,53	72,20	80,39	67,89	68,76
Sulawesi Selatan	67,90	69,38	64,25	71,84	68,53	75,54	61,51	70,86
Sulawesi Tenggara	69,44	91,14	56,95	61,99	71,13	88,07	55,51	74,66
Gorontalo	76,77	81,35	69,97	81,81	77,48	82,35	75,54	74,42
Sulawesi Barat	68,25	81,88	61,16	62,37	72,37	82,89	69,02	64,47
Maluku	65,90	76,04	63,20	57,43	78,20	87,17	76,18	70,13
Maluku Utara	61,52	73,53	61,00	47,25	73,27	92,27	61,79	67,59
Papua Barat	59,97	92,33	39,48	51,81	60,35	93,67	38,05	53,85
Papua	57,55	82,72	41,81	50,87	61,02	92,15	41,13	53,45
INDONESIA	72,82	80,30	70,63	66,87	70,09	76,45	70,11	62,05

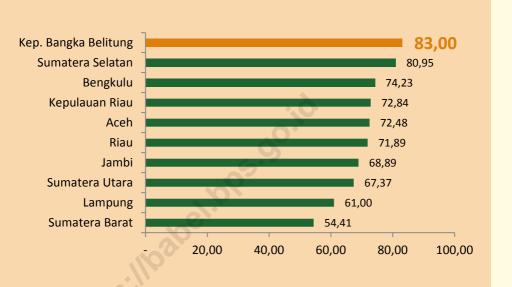








## Grafik 5. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi-Provinsi di Wilayah Sumatera, 2016



#### IDI Babel tertinggi di Wilayah Sumatera









#### INDIKATOR IDI YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Walaupun kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung telah berada pada kategori "baik", tetapi masih terdapat beberapa indikator yang nilainya cukup rendah dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu perlu diketahui permasalahan apa saja yang menyebabkan rendahnya nilai indikator IDI tersebut dan langkah serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai IDI di Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun beberapa indikator IDI yang memerlukan perhatian dan harus ditingkatkan, yaitu:

Tabel 4. Indikator IDI yang Perlu Mendapatkan Perhatian, 2016

No	Indikator	2015	2016	Perubahan	Lembaga yang Berperan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi	29,63	29,63	0,00	Eksekutif dan Parpol
2	Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	37,58	49,33	11,75	Eksekutif dan Legislatif
3	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	100,00	10,71	-89,29	Legislatif
4	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	50,00	41,66	-8,34	Eksekutif









Tabel 4 memperlihatkan ada 4 (empat) indikator IDI 2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori "buruk", yaitu indikator Persentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi, Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, dan Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Dari keempat indikator tersebut, tiga di antaranya telah berkategori buruk pada tahun 2015, bahkan indikator Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah di 2016 masih turun angkanya dibandingkan 2015.

Oleh karena itu kiranya perlu upaya pemerintah yang bersinergi dengan seluruh lembaga seperti DPRD, Partai Politik, SKPD terkait, dan memaksimalkan kinerja POKJA IDI serta melibatkan masyarakat agar dapat diketahui permasalahan apa yang menyebabkan nilai indikator tersebut menjadi rendah, sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dengan demikian diharapkan perkembangan demokrasi di Kepulauan Bangka Belitung dapat terus ditingkatkan sehingga tujuan IDI yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan meningkatkan pembangunan demokrasi dan bidang politik khususnya di Kepulauan Bangka Belitung dapat terwujud.

https://ps.go.id

# DATA MENCERDASKAN BANGSA